

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 07/DPRD-PS/2018
Tanggal : 23 April 2018
Tentang : Rekomendasi LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun 2017

Beberapa catatan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyikapi LKPJ Bupati Pesisir Selatan Tahun 2017 ini direkomendasikan agar ditindak lanjuti dan dipedomani dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada masa yang akan datang sebagai berikut :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dibidang penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah, Bank Samudera dan Hotel Balairung. Perlu memaksimalkan keuntungannya.
2. Dalam rangka mewujudkan perusahaan daerah yang maju dan modern dalam hal ini PT. Tirta Langkisau dan BPR Samudera, Disarankan pengangkatan/ pemilihan jajaran komisaris dan direksi diisi dengan tenaga profesional.

Badan Pendapatan

1. Disarankan Badan pendapatan Daerah untuk mengali dan melakukan pumungutan sumber pajak baru seperti Klinik Kesehatan, wallet dan hotel di kawasan pariwisata..
2. Terhadap Pajak Hotel, Restoran dan galian C supaya di intensifkan pemunggutannya.
3. Untuk dapat ditingkatkan pengawasan Pos retribusi masuk kawasan mandeh dan kawasan wisata lainnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Kami meapresiasi Pemerintah Daerah telah mengalokasikan dana Pendidikan sebesar 20 %, dan berharap agar dapat ditingkat untuk tahun selanjutnya.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM bagi tenaga pendidik dan kepala sekolah, disarankan kepada pemerintah Daerah untuk melakukan pelatihan dan bentuk lainnya dengan menempatkan alokasi anggaran secukupnya.
3. Disarankan pada pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan sarana prasarana pendidikan berdasarkan scala prioritas seperti ruang kelas baru, mobile, media pembelajaran dan lain-lain.
4. Untuk mengimplimentasikan misi agamais dalam kegiatan pembelajaran disekolah melalui program kegiatan yang terintegrasi dengan peningkatan pemahaman keagamaan dalam bentuk pesantren kilat,PHBI, program tahfidzh, ibadah bersama, bimbingan akhlak dan bentuk kegiatan lainnya.
5. Untuk mendukung Penyelenggaraan pendidikan secara optimal, disarnakan perlu segera membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan.

6. Disarankan Pemerintah Daerah memfasilitasi program beasiswa bagi putra daerah yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
7. Perlu pengawasan pada dunia pendidikan agar terbebas dari judi, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya.
8. Agar dapat ditingkatkan pembinaan pemberdayaan potensi adat dan budaya yang ada di Pesisir Selatan Secara berkelanjutan melalui promosi pada even kepariwisataan.

Dinas Pertanian

Dalam rangka meningkatkan Penghasilan Petani, disarankan kepada pemerintah Daerah agar dapat menerapkan sentuhan teknologi dalam pengelolaan produk-produk pertanian.

Dinas Kesehatan

1. Program peningkatan kualitas SDM dan profesionalitas tenaga kesehatan melalui pelatihan, supervise dan mekanisme control yang proporsional untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas layanan di RSUD dan Puskesmas dengan mempersingkat waktu tunggu, antrian dan memprioritaskan tindakan penyelamatan bagi pasien, apalagi pasien darurat.
3. Pimpinan RSUD dan Puskesmas memastikan tersedianya tenaga medis yang profesional seperti dokter, dokter spesialis, perawat, dan lain-lain pada setiap layanan dan sesuai waktu yang telah ditentukan.
4. Meningkatkan kenyamanan bagi pasien dan keluarga di ruang rawat inap dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung
5. Melengkapi Puskesmas dengan sarana IPAL secara bertahap.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan rumah sakit baru masih tertunda pembangunannya. Untuk itu disarankan kepada Pemerintah Daerah agar dapat menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sisa dari anggaran pembebasan tanah yang tidak terealisasi dari anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan agar dialihkan ke pembangunan sarana/fasilitas umum terutama pembangunan drainase dan fasilitas pengentasan kawasan kumuh

Dinas Perhubungan

1. Perlu Penataan dan mendorong tumbuhnya sarana transportasi massal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan transportasi bagi pelajar di kawasan tertentu.
2. Perlu disinkronkan dengan pariwisata untuk pembangunan halte ditempat strategis terutama di tempat pariwisata.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Diharapkan Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang ketertiban umum secara konsisten dan berkelanjutan. dengan menyediakan SDM yang professional dilingkup Satpol PP.

Dinas Sosial

1. Perlu ada upaya untuk mengintegrasikan program PMKS dengan program Pemerintah Daerah dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
2. Program pengentasan kemiskinan mesti berdasarkan data base yang jelas dan lengkap sesuai dengan indikatornya.
3. Perlu peningkatan dan perhatian terhadap kelompok/komunitas dalam rangka pemberdayaan ekonomi mikro dengan memperhatikan aspek kapasitas dan kapabilitas.

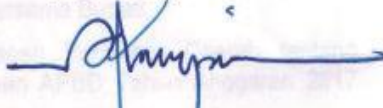
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB

Dalam rangkan peningkatan penyelengaran pemerintahan nagari perlu di dukung dengan SDM, untuk itu disaran dilaksanakan pelatihan manajeman bagi perangkat Nagari.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal :23 April 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,

DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

Wakil Ketua,

HERPI DAMSON BA. S.IP
Wakil Ketua,

H. APRIAL HABAS. SH. MH
Wakil Ketua,

RASMIL MURTADHA. S.IP

